

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **IV.1 Deskripsi Wilayah Kota Mataram**

Provinsi NTB terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB terletak di Pulau Lombok. Awal terbentuknya Kota Mataram ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram. Kemudian berubah status menjadi Kotamadya Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 dengan luas wilayah 61,30 km<sup>2</sup> (6.130 Ha). Pada 2007 Kota Mataram mengalami pemekaran wilayah dari tiga kecamatan dan 23 kelurahan menjadi enam kecamatan dan 50 kelurahan. Secara geografis Kota Mataram terletak pada posisi 116o04'–116o10' Bujur Timur, dan 08o33'– 08o38' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Batas-Batas Wilayah Kota Mataram**

<b>Utara</b>	Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat
<b>Selatan</b>	Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat
<b>Barat</b>	Selat Lombok
<b>Timur</b>	Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat

Sumber: Mataram dalam Angka Tahun 2016

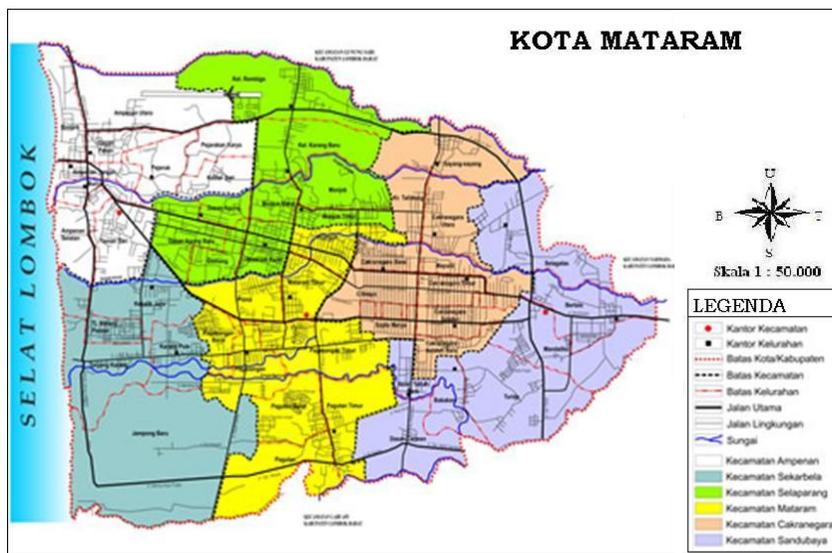
Wilayah Kota Mataram adalah 61,30 Km<sup>2</sup>, yang terbagi dalam 6 Kecamatan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 10,77 Km<sup>2</sup>, disusul Kecamatan Mataram dengan luas wilayah 10,77 Km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,46 Km<sup>2</sup>. Selengkapnya luas masing-masing wilayah kecamatan di Kota Mataram sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Ampenan	946	15,43
2	Sekarbela	1.032	16,84
3	Mataram	1.076	17,55
4	Selaparang	1.077	17,57
5	Cakranegara	967	15,77
6	Sandubaya	1.032	16,84
<b>Jumlah</b>		<b>6.130</b>	<b>100</b>

Sumber: Mataram dalam Angka Tahun 2016

**Gambar IV.1**  
**Peta Wilayah Administrasi Kota Mataram**



Sumber: mataramkota.go.id

Berdasarkan data BPS tahun 2015, jumlah penduduk Kota Mataram tercatat 450.226 jiwa. Jumlah penduduk perempuan

lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan), sebesar 98 persen.

Penduduk Kota Mataram belum menyebar secara merata di seluruh wilayah. Umumnya, penduduk banyak bermukim di Kecamatan Ampenan. Secara rata-rata, kepadatan penduduk Kota Mataram tercatat 7.345 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat yaitu Kecamatan Ampenan dengan kepadatan 9.275 orang setiap kilometer persegi.

**Tabel IV.3**  
**Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Menurut Kecamatan di Kota Mataram**

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan
	2014	2015	%
<b>Ampenan</b>	86 052	87 746	1,97
<b>Sekarbela</b>	62 508	64 946	3,90
<b>Mataram</b>	81 450	64 946	2,49
<b>Selaparang</b>	74 513	74 795	0,38
<b>Cakranegara</b>	66 516	66 983	0,70
<b>Sandubaya</b>	70 025	72 277	3,22
<b>Jumlah</b>	<b>441 064</b>	<b>450 226</b>	<b>2,08</b>

Sumber: Mataram Dalam Angka Tahun 2016

## **IV.2 Visi dan Misi Pembangunan Kota Mataram**

Berdasarkan analisis terhadap kondisi umum Kota Mataram saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 adalah **“Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”**.

Kota Mataram merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi tersebut merupakan satu kesatuan konsep yang memiliki nilai yang tak terpisahkan, sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi tersebut mengandung arti bahwa Kota Mataram yang ingin diwujudkan dalam lima tahun kedepan, adalah Kota yang memiliki masyarakat maju, religius, dan berbudaya.

- a. Maju mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan kualitas SDM Kota Mataram, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat *Gumi Mentaram* yang sejahtera. Kemajuan ini dapat diukur berdasarkan perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Religius mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi peningkatan kualitas masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan kebersamaan serta toleransi yang tinggi *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015* antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.

Nilai-nilai religius menjadi *spirit* dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

- c. Berbudaya mengandung makna dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajemukan, menguatnya identitas dan karakter masyarakat yang mandiri, bermoral dan bermartabat. Masyarakat berbudaya tidak hanya dapat dilihat dari berkembangnya adat istiadat, melainkan juga pada berkembangnya infrastruktur yang berkarakter kearifan lokal.

Untuk mencapai Visi “**Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya**”, maka Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu :

- a. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah.

- c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

### **IV.3 Keterbukaan Informasi Publik**

Pandangan umum tentang informasi atau informasi publik cukup beragam. Secara umum informasi atau informasi publik merupakan suatu yang dapat menambah pengetahuan dan berguna untuk mengurangi keragu-raguan pada saat akan memilih alternatif tindakan. Sedangkan dalam sebuah sistem, informasi merupakan data yang sudah diolah untuk proses pengambilan keputusan.

Sebagaimana ditegaskan oleh UU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat (1) dan (2), bahwa yang dimaksud dengan informasi serta informasi publik adalah: Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan

tandanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

UU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menggariskan tentang pentingnya hak memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut sangat tegas menekankan bahwa:

- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. Bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. Bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

Selanjutnya, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan Undang-undang ini dibentuk adalah:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

- b. Mendorong part isipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

UU KIP juga membawa implikasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain dalam kapasitas sebagai badan publik, pemerintah daerah juga diwajibkan menyiapkan perangkat teknis pengelolaan dan pelayanan informasi. Misalnya

penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), atau pembuatan masa retensi atas informasi dan dokumentasi publik di daerah. Untuk Kota Mataram sendiri pembentukan PPID di atur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2014 tentang pembentukan PPID.

#### **VI.4 Profil NGO**

##### **a) Fitra NTB**

FITRA NTB adalah sebuah perkumpulan yang bersifat sukarela dan tidak mencari keuntungan. FITRA NTB didirikan di Kota Mataram pada Hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2012 oleh sejumlah aktivis dari beberapa organisasi di Mataram yang peduli dengan agenda mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran publik. Pada pertemuan Nasional FITRA III November 2013, di Jakarta, FITRA NTB diterima sebagai anggota FITRA.

- **VISI Fitra NTB**

Mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran

- **Usaha-usaha Fitra NTB**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perkumpulan mendirikan kantor FITRA NTB di Mataram, dan menjalankan usaha-usaha antara lain :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan penyadaran warga atas hak-hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya, dalam hubungannya dengan pemerintahan dan swasta melalui pelatihan, bahan cetakan atau elektronik dan audio-visual, dan lain sebagainya
- 2) Menerima pengaduan dari masyarakat dalam upaya mewujudkan tata-kelola pemerintahan yang transparan serta pengelolaan anggaran dan sumberdaya publik yang berorientasi kesejahteraan masyarakat
- 3) Mengajukan pendapat-pendapat baik berupa usul, saran, kritik, dan komentar tentang masalah sosial, ekonomi, hukum dalam arti luas kepada lembaga-lembaga yang berwenang di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kepada masyarakat luas

- 4) Mendorong perbaikan dan penguatan system birokrasi, tata-kelola anggaran dan sumberdaya publik, serta penguatan kapasitas aparat birokrasi sembari mengedepankan perluasan akuntabilitas kinerja aparat kepada publik
- 5) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi pemerintah maupun non-pemerintah di dalam negeri serta dengan lembaga-lembaga internasional non-pemerintah di luar negeri.
- 6) Melaksanakan studi dan penelitian titik-titik/celah-celah krusial yang menjadi sumber sebab masalah dalam system pengelolaan anggaran, sumber daya public dan birokrasi serta mengolahnya menjadi usulan kebijakan kepada pemerintah dan rujukan informasi bagi publik luas dalam mendorong reformasi birokrasi dan tata-kelola anggaran
- 7) Melaksanakan kampanye publik untuk menumbuhkan dukungan masyarakat luas terhadap tata-kelola pemerintahan, pengelolaan Anggaran dan sumber daya

publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel, serta menekan penyalahgunaan sumber daya publik.

- 8) Menyelenggarakan penerbitan dan mendirikan perpustakaan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan

- **Struktur Organisasi Fitra NTB**

Ketua (Dewan Pengurus)	: Umar Ahmad Seth
Sekretaris	: Eryvn Kaffah
Bendahara	: Syaiful Muslim
Anggota Peneliti	: Sri Wahyuni
	: Salahuddin
	: Hendriadi
	: Safriatna Ach
Sekretaris Jenderal/Direktur	: Eryvn Kaffah
Koordinator Riset (Manager Program)	: Madiana

Koordinator Investigasi	: Ramli
Manager Lembaga	: Suhardi
Staf Koordinator Resources Center	: Hairul Anwar
Bagian Keuangan	: Laelatul Eli Erma

#### **b) Somasi NTB**

Somasi NTB (Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bersifat nirlaba dan independen. Dibentuk pada 23 Mei 1998, dan dideklarasikan pada tanggal 5 Oktober 1998. Somasi NTB didirikan oleh 10 orang yang berlatar belakang tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, wartawan, Aktivis mahasiswa, Aktivis NGO, dan praktisi hukum. Somasi NTB berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan secara resmi menjadi badan hukum pada tanggal 23 Nopember 2000 dengan Akte Notaris No. 21 melalui Kantor Notaris Sri Hartati, SH.

Dalam kiprahnya sifat keanggotaan Somasi NTB adalah terbuka namun terseleksi. Sehingga dapat menampung sebanyak mungkin keterlibatan masyarakat yang tidak memiliki reputasi

korupsi untuk menegakkan keadilan. Sebagai lembaga independen yang berfungsi melakukan kontrol sosial, prinsip dasar yang akan menjadi pola kerja Somasi NTB bersandar pada gerakan moral bukan gerakan politik, terbuka baik dari segi manajemen maupun hasil kerjanya.

Perkumpulan ini akan memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok tertindas, seperti buruh, petani, rakyat miskin kota, kelompok perempuan dan individual progresif melalui pendidikan kritis, distribusi informasi, pengorganisasian, dan pendampingan. Tujuan pelayanan tersebut guna membangun kemandirian rakyat untuk terlibat dalam dinamika perubahan sosial menuju tatanan sosial yang lebih adil dan sejahtera.

- **Visi Somasi NTB**

Memperhatikan amanat pendirian perkumpulan serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka visi perkumpulan ini secara teknis terbagi dalam dua bagian yakni : (1) **Visi Eksternal** : Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel (2) **Visi Internal** : Somasi NTB sebagai gerakan rakyat

anti korupsi untuk membangun tatanan sosial yang adil secara ekonomi, demokratis secara politik dan setara secara sosial.

- **Misi Somasi NTB**

1. Penguatan masyarakat sipil untuk advokasi korupsi dan kebijakan publik yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat miskin dan perempuan.
2. Mendorong reformasi kebijakan publik dan perbaikan pelayanan publik yang berorientasi kebutuhan rakyat miskin dan perempuan
3. Mendorong reformasi hukum yang meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan tersedianya akses keadilan bagi rakyat miskin dan perempuan
4. Mempengaruhi perubahan sistem politik yang lebih menjamin lahirnya penyelenggara negara yang bersih dan kapable, serta perbaikan representasi politik dan akuntabilitas politik kepada rakyat.

• **Pengurus Somasi NTB**

Dewan Etik	: Adhar Hakim, SH., MH.
	: Drs. Suhardi Suryadi
	: H. Abdullah, SH.,MH.
	: Budi Laksono, SE
	: Idul Fitriatun, SH
Koordinator Badan Pekerja	: Ahyar Supriadi, SH
Sekretaris Badan Pekerja	: Dwi Arie Santo
Bendahara	: Ida Rufaidah
Koordinator & Riset, Evaluasi dan Pengembangan	: Hendriadi
Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan	: Azis Fauzi
Koordinator Divisi Ekonomi Politik	: Abdul Kasim
Koordinator Divisi Birokrasi & Kebijakan Publik	: Hamdi
Urusan Rumah Tangga	: Saharudin
Administrasi Keuangan &	

Kantor : Siska Yulia Ningsih  
Kasir : Baiq Yuliana  
Urusan informasi dan Pubdok : Abdurrahman Wahid

**c) Lakpesdam NU Kota Mataram**

Lakpesdam NU Kota Mataram terbentuk pada masa kepengurusan Ketua Tanfizd NU Kota Mataram Drs.H.Tajudin dan sekretaris Syamsul Maarif. Kepengurusan Lakpesdam NU Kota Mataram diwujudkan melalui SK kepengurusan Nomor 15/NU-mtr/I/2011 masa bakti 2011-2015 dengan Ketua Bq.Ely Mahmudah, S.Ag dan sekretaris Siti Maryam, Spd. Pembentukan PC Lakpesdam NU Kota Mataram di hajatkan untuk menjadi lembaga yang mampu menterjemahkan nilai- nilai ke-NU-an dalam menyikapi persoalan kehidupan sosial, ekonomi, politik berdasarkan pandangan keagamaan yang dianut oleh NU dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan keagamaan dan kerakyatan yang tertuang dalam *mabdak siyasi* NU adalah mempertahankan nilai-nilai lama dan selalu mencari terobosan baru yang lebih inovatif dalam

kerangka memperjuangkan lima hak dasar kemanusiaan yang terkandung dalam 5 hak dasar yaitu :

1. Hak mempertahankan hidup
2. Hak atas pangan
3. Hak atas perlindungan keturunan
4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan
5. Hak berekspresi.

Inilah yang menjadi dasar dan pondasi perjuangan NU. Dalam rangka memperjuangkan hak tersebut Ketua PC NU Kota Mataram telah memandatkan Lakpesdam NU untuk melakukan kerja- kerja pemberdayaan kongkrit di masyarakat di Kota Mataram.

- **VISI**

Sebagai lembaga yang berkonsentrasi pada bidang kajian dan pengembangan sumberdaya manusia NU untuk mewujudkan organisasi yang peka, kritis, amanah, mandiri, terhubung dengan masyarakat, serta bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

- **MISI**

1. Melakukan kajian-kajian strategis untuk peningkatan peran jam'iyah dan jamaah NU dalam merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat
2. Menggerakkan SDM NU agar lebih dinamis untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat
3. Berperan aktif membangun sumberdaya ekonomi warga NU

- **TUJUAN**

1. Meningkatkan kemampuan warga *nahdliyin* khususnya dalam merespon ketidakadilan terkait pengurangan kemiskinan, kekerasan dan konflik sosial.
2. Meningkatkan peran organisasi NU dalam memberikan kontribusi atas upaya menjawab berkembangnya paham keagamaan yang bertentangan dengan prinsip kemajemukan warga bangsa.
3. Meningkatkan kemampuan pengurus dan kader NU dalam menggerakkan warga *nahdliyin* untuk

mencapai *jam'iyah* maupun *jamaah* NU sesuai Mabadi Khairo Ummah.

#### **d) Pemuda Muhammadiyah NU Kota Mataram**

Spirit Muhammadiyah senantiasa mengilhami setiap organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah. Demikian pula halnya dengan Pemuda Muhammadiyah, yang lahir dengan semangat yang sama dengan berdirinya Muhammadiyah, yaitu semangat untuk membangungenerasi yang tangguh untuk masa mendatang. Sebagai salah satu organisasi otonom tertua di lingkungan Muhammadiyah (berdiri 2 Mei 1932), Pemuda Muhammadiyah hadir sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

- **Visi**

Mempersiapkan kader dan generasi muda Indonesia untuk siap menghadapi tantangan masa depan yang lebih beragam, penuh dinamika dan berbagai kepentingan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah.

- **Misi**

Menjadikan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan keilmuan, gerakan sosial kemasyarakatan dan gerakan kewirausahaan sebagai tumpuan kegiatan dengan memahami setiap persoalan yang timbul dan kebutuhan lingkungan dimana Pemuda Muhammadiyah melakukan amal karya nyatanya.

- **Prinsip Dasar Organisasi**

Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pemuda, beraqidah Islam, dan bersumber pada al-Quran dan Sunnah Rasul. Organisasi ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi Pemuda Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

Pencapaian maksud dan tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala.
2. Memperdalam ilmu, memperluas pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan serta mengamalkan sesuai dengan ajaran Islam.
3. Memperdalam dan meningkatkan pemahaman Agama Islam.
4. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan kader.
5. Mengadakan dakwah di kalangan pemuda dan remaja.
6. Meningkatkan fungsi dan peran pemuda Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah, kader umat Islam, dan kader bangsa.
7. Memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan olahraga sebagai sarana dakwah Islamiyah.
8. Menumbuhkan dan mengembangkan seni budaya yang bernafaskan Islam.
9. Menggembirakan beramal yang diridhai Allah dan hidup tolong-menolong (ta'awun) dalam ukhuwah Islamiyah.

10. Usaha-usaha lain yang tidak menyalahi tujuan.

Pengurus Organisasi Pimpinan Daerah Pemuda  
Muhammadiyah Kota Mataram periode tahun 2016-2018.

Ketua Umum	: Candra, M.Pd
Sekretaris Umum	: Rudi Arrahman
Ketua Organisasi	: Ilham
Ketua Pengkaderan	: Muslimin Magenda
Ketua Kajian dan Dakwah Islam	: Syamsul Hidayat
Ketua Pengkajian Ilmu	
Pengetahuan	: Agus Supriyanto
Ketua Advokasi	: Darwan Samurdja